

BAB III

KAJIAN OBYEK PENELITIAN

A. Lakpesdam NU Jepara

Secara historis, proses kelahiran Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU merupakan bagian dari perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama'. Keputusan kembali kepada khittah NU 1926 yang dihasilkan oleh muktamar NU ke 27 di Situbondo merupakan titik tolak bagi perkembangan dan dinamika baru dalam perjalanan NU. NU sejak tahun 1952 peran dan orientasinya jauh dari orientasi awal pendirinya, sehingga berdampak pada terbengkalainya agenda pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusianya. Hal tersebut dikarenakan NU terlibat politik praktis dengan menjadi partai politik atau bagian dari partai. Dengan adanya keputusan untuk kembali kepada khittah 1926, akhirnya NU kembali kepada habitatnya yaitu dunia pendidikan, dakwah, pengembangan ekonomi dan pelayanan masyarakat.¹

¹ Dalam perjalanannya, NU yang semula mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan, mengalami pergeseran. Pada muktamar NU di Purwokerto 1946, NU menyerukan warganya untuk memberikan dukungan kepada Masyumi, bahkan menjadi tulang punggung kekuatan Masyumi. Karena tidak ada kenyamanan dengan dualisme antara menjadi Ormas dan Partai Politik, NU pada muktamarnya di Palembang 1972 dengan mantap menegaskan identitasnya tidak sebagai ormas, melainkan sebagai partai politik independen, Partai Nahdlatul Ulama'. NU berkiprah sebagai partai politik sampai tahun 1973 ketika pemerintah melalui kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian. Akhirnya pada 5 Januari 1973 NU berfusi dengan PPP bersama Parmusi, PSII, dan Perti. Pengabaian warga dan penghambaan pada urusan politik kekuasaan terjadi karena para elit NU sudah terbiasa dengan kehidupan berpolitik praktis. Hal tersebut terlihat dari rentang panjang sejak tahun 1952 sampai tahun 1973. Lihat Mahrus El mawa, dkk, *20 Tahun Perjalanan Lakpesdam, Memberdayakan Warga NU*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 6.

Arti penting kehadiran Lakpesdam NU selain sebagai upaya untuk memulihkan kegiatan NU menurut khittah 1926 yang bertumpu pada kegiatan pengembangan masyarakat di semua tingkatan adalah agar dapat membantu NU dalam meningkatkan peran kepemimpinan, memperbaiki sistem informasi, ikut mengkoordinasi cabang-cabang NU dan institusi lain dibawah NU melalui kegiatan kemasyarakatan, terutama sektor pengembangan ekonomi warga NU.²

Lakpesdam NU lahir diprakarsai oleh Fahmi D. Saifuddin³ yang merupakan ketua PBNU Bidang sumber daya manusia pada masa kepengurusan KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU). Tepatnya pada tanggal 6 April 1985 bertepatan dengan 15 Rajab 1405 H. Pada mulanya, mulai tahun 1985-1994, Lakpesdam merupakan lajnah, artinya hanya melaksanakan program NU yang memerlukan penanganan khusus. Seiring berjalannya waktu, agar posisi lakpesdam semakin otonom dan kokoh, mulai tahun 1995 sampai sekarang berubah menjadi lembaga, artinya menjadi perangkat departemensi organisasi Nahdlatul Ulama' yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama'.⁴

Lakpesdam NU merupakan lembaga struktural di bawah Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat pusat sampai cabang di kabupaten atau kota di Indonesia termasuk di Jepara. Lakpesdam NU Jepara berdiri pada 7 April 1985. Periode kepemimpinan dari Lakpesdam NU adalah selama 5 tahun.

² *Ibid.*, hlm. 66.

³ Fahmi D Saifuddin merupakan seorang dokter dan putra KH. Saifuddin Zuhri. Dia merupakan penggerak kaum muda NU agar kembali kepada khittah 1926 setelah puluhan tahun terlibat dalam politik praktis. Dia juga merupakan Penggagas dalam majlis 24 dan kelompok G muktamar ke 27 di Situbondo. *Ibid.*, hlm. 63.

⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah periode kedua dari kepemimpinan Mayadina Rahma Musfiroh yang sudah menjabat sebagai ketua Lakpesdam NU Jepara sejak tahun 2005-2010 dan 2010-2015.⁵

Lakpesdam NU Jepara merupakan lembaga yang mengkaji isu-isu strategis dan pemberdayaan manusia untuk transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Isu-isu yang dikaji oleh Lakpesdam NU Jepara adalah tidak hanya tentang keislaman tetapi juga tentang kebangsaan. Tugas dan peran dari Lakpesdam NU Jepara adalah untuk melakukan advokasi kebijakan publik dasar, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dalam kegiatan dakwahnya, Lakpesdam NU Jepara memiliki ciri khas Islam Nusantara artinya moderat, toleran, ramah, berkeadilan, serta mengakui dan menghargai keragaman.⁶

Sebagai bukti dari adanya advokasi, Lakpesdam NU Jepara pernah membuat Pusat Aduan Masyarakat atau *Crisis Center*. Program ini merupakan upaya untuk menampung aspirasi tentang berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat.⁷ Beberapa bentuk advokasi yang pernah dilakukan oleh Lakpesdam NU Jepara adalah terkait penambangan pasir besi di pesisir Jepara utara dan praktik galian C ilegal di desa Tunggul Pandean Nalumsari Jepara.

⁵ Wawancara dengan Lukman Hakim, Ketua Pelaksana Program Inklusi Sosial Lakpesdam NU Jepara pada hari ahad, 12 maret 2017 pukul 14.30 di Tahunan Jepara.

⁶ Data tentang Lakpesdam NU ini diambil dari website resmi Lakpesdam NU dengan alamat <http://lakpesdam.or.id/tentang-lakpesdam/> pada hari Sabtu, 4 Maret 2017 Pukul 19.30 WIB.

⁷ Dalam praktiknya, upaya ini dapat menjadi wadah yang cukup efektif bagi masyarakat dengan banyaknya aduan terkait persoalan dan aspirasi yang dialami oleh masyarakat. Beberapa contoh yang lain adalah seperti kecelakaan laut antara perahu nelayan dengan kapal pengangkut batu bara PLTU, kasus nelayan yang hilang, kasus penelantaran anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga, penggusuran pasar dan lain-lain. Tim Penulis, *5 Tahun Khidmah PC Lakpesdam NU, Ikhtiar Menguatkan Jam'iyah dan Memberdayakan Jama'ah*, (Jepara: Lakpesdam NU Jepara, 2015), hlm. 8.

Bentuk advokasi yang dilakukan oleh Lakpesdam NU terhadap praktik galian C ilegal di desa Tunggul Pandean Nalumsari Jepara adalah melakukan penguatan warga melalui *rembug* dan diskusi intensif dengan warga yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung, memfasilitasi warga untuk mengadu ke pihak kepolisian dan audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, membuat *press release* kampanye publik terkait praktik penambangan liar, dan mendorong pemerintah daerah untuk sidak dengan turun ke lapangan bersama SKPD terkait.⁸ Bentuk advokasi tersebut juga bertujuan memberikan gambaran bahwa Lakpesdam NU Jepara merupakan lembaga yang mengutamakan diskusi serta kritis dan reflektif dalam berfikir.

Selain advokasi tersebut, Lakpesdam NU Jepara juga melakukan advokasi yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Advokasi pendidikan dan ekonomi yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Jepara adalah mengentaskan generasi muda yang sudah bekerja yang masih dalam usia wajib belajar karena desakan ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi kuantitas kemiskinan. Advokasi tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam program pengurangan

⁸ Dasar dari advokasi yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Jepara adalah mengacu pada pasal 28 h ayat (I) UUD 1945, sebagai pemegang amanah rakyat dan menjamin hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat, serta UU. No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lihat *Ibid.*, hlm. 12.

pekerja anak yang berorientasi untuk mendukung program keluarga harapan (PKH).⁹

Sedangkan bentuk advokasi dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Jepara adalah menanggulangi adanya penderita HIV/AIDS yang dialami oleh warga Desa Wedelan Bangsri pada bulan April 2014. Dalam menanggulangi kejadian tersebut, Lakpesdam NU Jepara melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar dapat memberikan fasilitas tempat terhadap penderita HIV/AIDS yang mengalami diskriminasi, pengasingan dan penolakan dari keluarganya.¹⁰

Dalam asas organisasinya, Lakpesdam NU Jepara membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga atau organisasi lain.¹¹ Contoh dari adanya kerja sama dengan lembaga lain adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan membangun kemitraan dengan PLTU Tanjung Jati B sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam penanganan konflik sosial sebagai dampak dari pembangunan PLTU Tanjung Jati B.¹²

Selain itu, tujuan dari adanya kemitraan dengan lembaga lain adalah sebagai bentuk advokasi kebijakan publik dan kajian isu-isu strategis. Seperti halnya dalam penelitian ini, Lakpesdam NU Jepara bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

⁹ Program tersebut pada tahun 2014, berhasil menarik 150 anak dari tempat kerjanya, sedangkan pada tahun 2015, dapat menarik 130 pekerja anak dari tempat kerjanya. *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

¹¹ Data tentang Lakpesdam NU ini diambil dari website resmi Lakpesdam NU dengan alamat <http://lakpesdam.or.id/tentang-lakpesdam/> pada hari Ahad, 5 Maret 2017 Pukul 20.30 WIB.

¹² Lihat Tim Penulis, *5 Tahun Khidmah PC Lakpesdam NU, Ikhtiar Menguatkan Jam'iyah dan Memberdayakan Jama'ah*, *op.cit.*, hlm. 13.

(Kemenko PMK)¹³ lewat program peduli yang menggunakan pendekatan Inklusi Sosial sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marginal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan.

Contoh lain terkait program Lakpesdam NU Jepara tentang kepedulian terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adanya program PNPM Peduli fase I yang pernah dilaksanakan bekerja sama dengan Lakpesdam NU Jakarta, Kemenko Kesra, dan *The Asia Foundation*. Program tersebut merupakan upaya untuk melakukan pemberdayaan kelompok marginal khusus perempuan di pedesaan, pesisir, dan pulau kecil yang tidak terjangkau oleh program pemerintah. Program tersebut dilaksanakan di 10 desa¹⁴ dari 4 kecamatan yang meliputi kecamatan Batealit, Kembang, Kedung, dan Karimun Jawa.

Contoh dari bentuk kepedulian Lakpesdam NU Jepara terhadap kesejahteraan masyarakat adalah adanya kegiatan pendampingan kelompok

¹³ Dalam mewujudkan Nawa Cita Kabinet Kerja Periode 2015-2019, Kemenko PMK mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan lima fokus area yaitu, jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar, pembangunan manusia berkarakter, selaras data, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa semesta. *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁴ Desa yang mengikuti program tersebut adalah Bantrung atas nama kelompok perempuan berkah mandiri dengan produk carang madu, Raguklampitan atas nama kelompok perempuan lestari mandiri yang membuat produk emping ketan, keripik gadung, dan makanan kering. dan Sumosari atas nama kelompok perempuan Roudlotul Jannah yang membuat produk keripik pisang, singkong, dan usaha bordir sebagai perwakilan dari Kecamatan Batealit. Dari Kecamatan Kedung adalah Surodadi atas nama kelompok perempuan Dadi Sejahtera dengan produk makanan kering, Desa Panggung atas nama kelompok perempuan pesisir mandiri dengan produk kerupuk ikan, dan Desa Karangaji atas nama kelompok perempuan Kartika Jaya yang membuat produk trasi, ikan asin, dan krupuk ikan. Adapun dari Kecamatan Kembang adalah diwakili oleh Desa Balong atas nama kelompok perempuan mandiri Balong dengan produk jenang atau dodol musiman. Sedangkan dari Kecamatan Karimun Jawa diwakili oleh Desa Kemojan atas nama kelompok perempuan asma'ul husna Kemojan dengan produk usaha simpan pinjam, olahan rumput laut dan ikan asin. Dari Pulau parang dengan produk usaha simpan pinjam dan dari pulau nyamuk atas nama kelompok perempuan Asma'ul Husna Nyamuk dengan produk simpan pinjam. *Ibid.*, hlm. 19.

industri rumahan di kawasan ring satu PLTU Tanjung Jati B Jepara yang meliputi Desa Kaliaman, Tubanan, dan Bondo. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mendorong berdirinya kelompok strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, melakukan pelatihan pemasaran dan keterampilan produktif berbasis potensi lokal serta diversifikasi usaha masyarakat.¹⁵

Adapun kaitannya peran Lakpesdam NU Jepara terhadap Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan induk organisasi, Lakpesdam NU memiliki tugas yang berkaitan dengan pengembangan peran strategis NU dalam bermasyarakat dan bernegara yaitu memperkuat institusi NU agar mampu mengartikulasikan kepentingan umat dengan memberikan input substansial terkait isu aktual yang relevan, melakukan kajian strategis peran NU dalam bermasyarakat dan bernegara, memobilisasi gagasan pengembangan sosial budaya, hukum, politik dan ekonomi rakyat toleran dan berkeadilan *ala ahlusunah wal jamaah*.¹⁶

Sedangkan tugas dari Lakpesdam NU Jepara yang berkaitan sebagai penggerak dan dinamisator dalam penyusunan pola-pola pengembangan sumber daya manusia di lingkungan NU adalah mengembangkan dan memberdayakan Sumber daya NU melalui penguatan kelembagaan, pelatihan-pelatihan reguler dan tematik, mengembangkan program percontohan

¹⁵ Hasil dari adanya pendampingan industri rumahan Lakpesdam NU Jepara adalah produk Crispi ikan teri dan cumi dari home industri Vita Baby Fish Bondo, Crispi ikan laut dan dendeng kulit ketela dari home industri Pak nanang Bondo, Abon Tuna dari home industri Priyo Bondo, Abon Tuna, naget dan otak-otak dari mulya bhakti home industri Bondo, Aneka makanan kering dan basah dari home industri sari *snack* dan *catering* Kaliaman, roti isi abon, larut, egrol, roti lipat, kacang open, kacang plintis, dan roti pisang dari home industri yati catering Kaliaman, Larut dan roti kering dari home industri Turikhah Catering Kaliaman, serta roti tiwul sintesis, roti pisang, dan tahu bakso dari home industri Maswan Kaliaman. *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁶ Tim Penulis, *Rencana Strategis PC Lakpesdam NU Jepara periode 2010-2015*, (Jepara: Lakpesdam NU Jepara, 2010), hlm. 1.

pemberdayaan masyarakat di lembaga lingkungan NU, melakukan pendidikan kewargaan, mengembangkan jaringan kerja, melakukan fasilitasi pendampingan warga dalam advokasi serta mengembangkan pusat data dan informasi.¹⁷

Dalam programnya, Lakpesdam NU Jepara memfokuskan pada sembilan program umum sesuai dengan amanat hasil Konferensi Cabang Tahun 2010 dan Hasil Rapat Kerja NU Cabang, yaitu : (1) program pengembangan pemikiran keagamaan dan penguatan paham ke NU an; (2) program penguatan dan penataan kelembagaan; (3) program pengembangan media dan teknologi informasi; (4) program pemberdayaan ekonomi umat; (5) program pemberdayaan politik warga; (6) program lingkungan hidup; (7) program hukum, kebijakan dan pelayanan publik; (8) program kaderisasi; (9) program pengembangan kebudayaan NU.

Pada program pengembangan pemikiran keagamaan dan penguatan paham ke NU an kegiatan yang dilakukan adalah “*Training Quantum Islam Aswaja*,” penyelenggaraan “*Nahdliyin Job Training Center*,” “*Aswaja Journey*,” dan penyelenggaraan “Pendidikan Karakter Tematik Paham ke NU an.”¹⁸ Pada program penguatan dan penataan kelembagaan, kegiatan yang dilakukan adalah “Pengkaderan Banom dan Lembaga,” “Training of Trainer Analisa Sosial Kader Nahdliyin,” “Halakah Manajemen,” “Halakah *Syuriyah*,” dan “Pelatihan Tenaga Penggerak dan Pendamping Ranting dan Anak Ranting.”

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5

Pada program pengembangan Media dan Teknologi Informasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah Diklat Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, *Diklat* Jurnalistik dan Media Pengembangan Informasi. Pada Program pemberdayaan ekonomi umat, kegiatan yang dilakukan adalah *Workshop* Sosialisasi Konsep Pembentukan Simpul Ekonomi Jamaah, *Diklat* Kewirausahaan dan Koperasi, dan kursus-kursus keterampilan.¹⁹

Pada program pemberdayaan politik warga, kegiatan yang dilakukan adalah ToT Politik Kewargaan, kegiatan *Candidat School*, dan *Diklat* Politik Lokal (*Local Politic Training*). Sedangkan pada program lingkungan hidup kegiatan yang dilakukan adalah Pelatihan *Disaster* Manajemen Bagi Masyarakat Daerah Rawan dan Relawan, *Workshop* Pelestarian Lingkungan Hidup.

Pada program hukum, kebijakan dan pelayanan publik, kegiatan yang dilakukan adalah *diklat* bagi pemangku sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, *diklat* untuk tenaga pelayanan publik sektor kesehatan, administrasi kependudukan, dan sektor yang langsung berhubungan dengan masyarakat, serta workshop tentang hukum dan kebijakan publik. Sedangkan pada program kaderisasi, kegiatan yang dilakukan adalah *workshop* pembentukan kurikulum dan sistem pengkaderan NU, serta ToT dan *diklat* pengkaderan.²⁰

Dalam Upaya pengembangan jaringan dan kerjasama kelembagaan, Lakpesdam NU Jepara melaksanakan program pemberdayaan ekonomi umat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dan program hukum, kebijakan dan pelayanan publik dengan bentuk kegiatan aktif dalam aliansi dan jaringan yang ada terkait masalah hukum kebijakan dan pelayanan publik, bekerja sama dengan lembaga hukum yang berkompeten terkait penyelesaian masalah warga NU dan pendampingan lembaga untuk menggagas sekolah komunitas dan membantu mengembangkan sekolah yang ada dan memiliki potensi menjadi sekolah percontohan.²¹

B. Intoleransi di Desa Dermolo dan Peran Lakpesdam NU Jepara.

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Dermolo terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Kembang dengan jarak sekitar 8,20 KM dari kantor Kecamatan Kembang. Desa Dermolo memiliki luas daerah 1.680 ha yang terbagi menjadi 8 dukuh dengan 8 RW dan 27 RT serta 1546 bangunan rumah. Jumlah penduduk desa Dermolo adalah 5.694 orang dengan perincian 2.854 laki-laki dan 2.840 perempuan.²²

Sarana perekonomian yang ada di desa Dermolo adalah 37 toko dan kios, 5 koperasi simpan pinjam, dan 45 perusahaan yang meliputi industri, perdagangan dan angkutan. Jumlah sarana pendidikan, sosial dan budaya adalah 6 TK, 1 MI, 3 SD, 9 masjid, 14 musholla, 1 wihara, 1 pos kesehatan, dan 1 puskesmas.²³ Sebagian besar warga desa Dermolo bekerja sebagai buruh tani di PTPN, selebihnya adalah sebagai PNS, Guru, pedagang, dan wiraswasta. Dalam berkeyakinan, warga dermolo mayoritas beragama Islam,

²¹ *Ibid.*, hal. 6.

²² Diambil dari Laporan Bulanan Desa Dermolo Kecamatan Kembang Bulan Januari 2017 pada hari selasa, 21 february 2017 pukul 10.30 WIB.

²³ Diambil dari Data Monografi Statis Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara pada hari selasa, 21 february 2017 pukul 10.30 WIB.

selebihnya adalah beragama Kristen dengan jumlah 40 orang,²⁴ 1 orang katolik, dan 48 orang Budha.²⁵

Adapun kondisi sosial dan keberagamaan di Desa Dermolo berjalan dengan baik. Hubungan terkait masalah ekonomi juga terkesan baik sebagaimana layaknya penduduk desa lainnya, yang mengedepankan pola dan prinsip kekeluargaan. Namun pada tahun 2002, setelah adanya penentangan dari sebagian warga mayoritas terhadap pendirian gereja sebagai rumah ibadah warga Kristiani, memiliki dampak terhadap kondisi sosial keberagamaan di antara warga Dermolo.²⁶ Warga Kristiani Dermolo yang sudah menetap sejak tahun 1960 merasa perlu dengan adanya gereja tersebut, karena biasanya untuk melakukan ibadah, warga Kristiani harus pergi ke gereja di desa Beji, Kaligarang, Kelet, dan Kembang yang jaraknya cukup jauh dari Desa Dermolo.

Inisiatif pendirian gereja berasal dari usulan Kepala Desa yang berkuasa saat itu.²⁷ Pada 9 Maret 2002, Setelah itu, proses pendirian gereja dilanjutkan dengan melengkapi administrasi perijinan agar mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Dalam perijinan tersebut agar sesuai dengan pasal dalam SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tanda tangan yang dimasukkan dalam administrasi perijinan lingkupnya dalam satu kecamatan, karena dari

²⁴ Hasil wawancara dengan Theofalus Tumijan, Pendeta Desa Dermolo. Pada hari sabtu, 25 Maret 2017 pukul 14.00 WIB, di Dermolo.

²⁵ Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Dermolo, Bapak Juyanto, pada hari selasa, 21 februari 2017 pukul 10.30 WIB.

²⁶ Nur Kholis H, Amin Sholahudin, *Kidung Sunyi Gereja Dermolo, Menyusun Sejarah Lisan dari bawah*, (tt.p: t.p, 2010). hlm. 16.

²⁷ Lakpesdam NU Jepara, *Laporan Narasi Teori Perubahan Agama dan Kepercayaan Minoritas*, (tt.p : t.p., 2015), hlm. 1-2.

umat Kristiani Desa Dermolo belum mencukupi jumlah minimum yaitu 90 orang.²⁸

Setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan, proses dilanjutkan dengan kegiatan peletakan batu pertama, namun setelah itu, mulai muncul adanya penolakan dari kelompok warga lainnya agar IMB tersebut dibatalkan. Sebagian warga yang menolak tersebut kemudian mendirikan forum yang bernama FSMD (Forum Solidaritas Muslim Dermolo) yang mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara. FSMD adalah terdiri dari Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama' yang lahir saat pembangunan gereja berlangsung sebagai respon terhadap pembangunan gereja Dermolo.²⁹ Upaya penolakan tersebut dikarenakan persoalan beda penafsiran terkait syarat pendirian rumah ibadah tentang SKB dua Menteri nomor 1/1969. Menurut FSMD, tandan tangan yang diajukan oleh panitia pembangunan gereja ada yang tidak asli warga Dermolo dan terdiri dari orang Islam *abangan*,³⁰ Penentangan dilanjutkan provokasi serta intimidasi dari FSMD kepada imam-imam Musholla untuk menolak gereja tersebut serta dengan meminta kepada Bupati Jepara agar membatalkan ijin pendirian gereja tersebut.³¹

Pada 17 Juni 2002, melalui surat nomor 452.2/2581 akhirnya Bupati mengeluarkan Surat Keputusan terkait penundaan sementara pembangunan

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Nur Kholis H, Amin Sholahudin, *Kidung Sunyi Gereja Dermolo, Menyusun Sejarah Lisan dari bawah, op.cit.*, hlm. 3.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Priyanto, Tokoh FSMD pada hari sabtu, 25 Maret 2017 pukul 15.30 di Dermolo.

³¹ *Ibid.*,

gereja umat Kristiani Desa Dermolo. Setelah adanya surat dari Bupati, kemudian umat Kristiani dan FSMD³² bersepakat untuk menunda pembangunan gereja tersebut. Paska kesepakatan tersebut, umat Kristiani tidak bisa menikmati kegiatan peribadatan sebagaimana pemeluk agama yang lain dan menjalani kegiatan peribadatan di sebuah Garasi Mobil.³³

Pada tahun 2013, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jepara menyurati dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Jepara untuk memberikan izin pemanfaatan bangunan gereja tersebut. Setelah itu, warga Kristiani dapat memanfaatkan gereja tersebut sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Pemanfaatan gereja tersebut tidak berlangsung lama dan hanya satu kali. Pada tahun 2014, terjadi peristiwa gagalnya perayaan natal setelah Pemerintah Kabupaten Jepara menghentikan sementara Gereja Dermolo melalui surat³⁴ bernomor 452.4/7431 tertanggal 16 Desember yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara. Dasar hukum dari adanya pelarangan tersebut adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan pendirian rumah ibadah.

³² Dalam wawancara dengan Bu Hidayah, Bu Dwi Hastuti, dan Theofalus Tumijan, FSMD yang menolak adalah mayoritas dari pihak Muhammadiyah. Wawancara pada hari sabtu, 25 Maret 2017 pukul 14.00 di Dermolo.

³³ Nur Kholis H, Amin Sholahudin, *op.cit.*, hlm. 2.

³⁴ Dalam surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara tersebut menyatakan bahwa Gereja Dermolo belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada angka I dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Lihat Lakpesdam NU Jepara, *Laporan Narasi Teori Perubahan Agama dan Kepercayaan Minoritas*, (tt.p : t.p., 2015), hlm. 1-2.

Selain pendirian rumah ibadah warga Kristiani, masih ada beberapa fakta intoleransi yang terjadi di Dermolo. Dalam data hasil studi pendahuluan sebelum melaksanakan program Inklusi Sosial di Desa Dermolo, Lakpesdam NU Jepara meneliti dan mengidentifikasi bentuk intoleransi masyarakat Dermolo dan kemudian melakukan pemetaan permasalahan agar dapat ditangani secara terarah, efektif dan efisien. Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh warga desa Dermolo dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu pelayanan sosial, penerimaan sosial, dan kebijakan publik.

Dalam pelayanan sosial, permasalahan yang terjadi adalah peserta didik yang beragama kristen tidak mendapatkan guru dan materi pelajaran agama Kristen di sekolahnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik Kristiani belajar sendiri dengan membaca buku yang dipinjam sendiri dari teman dari sekolah yang lain. Permasalahan tersebut disebabkan tidak adanya kepedulian dari pemerintah terhadap warga Kristiani yang merupakan warga minoritas.³⁵ Selain itu, permasalahan yang lain adalah terkucilkannya warga Kristiani dalam interaksi perekonomian (jual beli, bertani), dan perlakuan diskriminatif terhadap warga miskin kristiani dalam bantuan penerimaan bantuan sosial (bedah rumah).³⁶ Hal tersebut terjadi dan sebagai akibat dari adanya penentangan terkait pendirian gereja yang berdampak pada egoisme pribadi.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Danang, Ketua Persekutuan Pemuda Gereja Beji, pada hari sabtu, 25 maret 2017 pukul 14.00 di Dermolo.

³⁶ Laporan Lakpesdam NU Jepara tentang Narasi Teori Perubahan (Theory of Change), Revitalisasi Kehidupan Kebhinekaan Masyarakat Desa Dermolo Kabupaten Jepara, hlm. 1-2.

Adapun yang berkaitan dengan penerimaan sosial, permasalahan yang terjadi adalah warga Kristiani diduga melakukan kristenisasi, warga Kristiani tidak dilibatkan dalam proses kegiatan-kegiatan di desa seperti perkumpulan PKK, RT, dan RW, tidak adanya solidaritas warga muslim terhadap warga kristiani ketika salah satu warga kristiani meninggal dunia, dan diskriminasi dalam perayaan keagamaan. Keseluruhan permasalahan terkait penerimaan sosial juga merupakan bagian dari dampak adanya pendirian gereja.³⁷

Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan adalah tidak diakuinya IMB pembangunan gereja yang ditandatangani oleh Dinas Perizinan. Adanya perbedaan penafsiran dalam SKB 2 Menteri terkait syarat pendirian rumah ibadah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jepara tidak mengakui izin warga dan MUI. FKUB juga tidak merekomendasikan pendirian rumah ibadah. Selain FKUB, Pemerintah Kabupaten Jepara JUGA tidak memfasilitasi untuk memberikan solusi terkait dengan konflik rumah ibadah karena dianggap akan melakukan kristenisasi dan khawatir akan adanya pertikaian antar warga mayoritas dan minoritas.³⁸

Dalam program inklusi sosial sebagai upaya untuk menangani problematika terkait toleransi beragama di Desa Dermolo, tujuan Jangka Panjang Lakpesdam NU Jepara adalah untuk merevitalisasi kehidupan kebhinekaan di Desa Dermolo. Sedangkan tujuan jangka pendeknya yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan tercapainya kegiatan dakwah program

³⁷ Wawancara dengan Bapak Danang, Tokoh Pemuda Kristiani Dermolo pada hari sabtu, 25 Maret 2017 pukul 15.00 di Dermolo.

³⁸ *Ibid.*

inklusi sosial adalah terbangunnya pengakuan sosial antar umat beragama di desa Dermolo, munculnya inisiatif warga dalam merespon sikap-sikap atau tindakan intoleransi yang menimbulkan disharmoni, adanya gerakan pemberdayaan sosial ekonomi oleh kelompok perempuan lintas iman di Dermolo, adanya pola-pola kerjasama pemberdayaan ekonomi, terdapat kesepakatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terlibat aktif dalam membangun suasana kebhinekaan dan saling berkontribusi dalam forum-forum kemasyarakatan yang mendukung kultur kebhinekaan di Desa Dermolo, Pemerintah Daerah dan Desa membuat kebijakan yang menjamin pelaksanaan ibadah umat Kristiani Demolo, serta terbangunnya kebijakan kebhinekaan tingkat Desa Dermolo.³⁹

Kegiatan yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Jepara yang pertama adalah mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) dan Rembug Warga Desa Dermolo, tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai sarana untuk berkumpul bersama antara warga mayoritas dan minoritas. Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Jepara DR. H. Sebroto, MM dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara warga mayoritas dan minoritas dalam upaya membangun kebersamaan suasana inklusif di antara warga yaitu dengan membuat kegiatan-kegiatan bersama yang bisa membaurkan warga, membuat rumah inklusi yang menjadi pusat warga berkumpul tanpa membedakan latar belakang keyakinan.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Data diambil dari Laporan Triwulan Lakpesdam NU Jepara periode 2010-2015 selama bulan maret-juni 2015.

Kegiatan yang kedua adalah *Workshop* Pemberdayaan Ekonomi, kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 30-31 Mei 2015 di gedung Muslimat NU ranting Dermolo. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Dermolo, ketua PC.NU Kabupaten Jepara Drs. H. Asyhari Syamsuri, 30 ibu-ibu dari perwakilan masyarakat mayoritas yang terdiri dari Fatayat dan Muslimat NU Dermolo, Aisyah atau Perempuan Muhammadiyah Dermolo dan minoritas umat Budha dan Kristiani.

Pada hari pertama *workshop* tersebut, kegiatan dipandu oleh Bapak Muid dari LPPNU. Kegiatan diawali dengan *brainstorming* untuk melakukan pemetaan dan menggali potensi lokal dengan metode diskusi kelompok yang membaurkan mayoritas dan minoritas Kristiani. Sedangkan pada hari kedua, kegiatan dipandu oleh Bu Ririn dari Dinas UMKM. Dalam materinya, disampaikan pentingnya untuk berkelompok dan membuat usaha bersama yang didalamnya diisi oleh warga dengan tanpa melihat latar belakang agama, suku dan ras.

Setelah kegiatan *workshop* selesai, dilaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut yang hasilnya adalah adanya kesepakatan bersama untuk mendirikan Kelompok Perempuan Cahaya Mandiri yang tujuannya adalah membuat usaha pengolahan hasil pertemuan berupa tata boga, melaksanakan pelatihan keterampilan, dan usaha simpan pinjam kelompok. Selain itu, kelompok ini juga bertujuan untuk menyatukan dan mengakrabkan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam kelompok ini yang menjadi ketua adalah Bu Harini dari Unsur Muhammadiyah, Sekretaris Bu Sri Surhartini

dari Unsur Minoritas Kristiani dan Bendahara Bu Hidayah dari Unsur Muslimat dan Fatayat.⁴¹

Kegiatan yang ketiga adalah advokasi pelayanan fasilitasi pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti salah satu persoalan yang terjadi di Desa Dermolo yaitu eksklusi di pelayanan pendidikan fasilitasi Buku Paket PAK (pendidikan agama Kristen) dimana sisiwa-siswi dari anak minoritas Kristiani selama ini tidak pernah mendapatkan guru dan buku paket pendidikan agama Kristen.

Kegiatan yang keempat adalah Ngaji Multikulturalisme dan Kebhinekaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Juli 2015 di Balai Desa Dermolo yang dirangkai dengan acara Buka Bersama. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengundang semua perangkat Pemerintah Desa Dermolo, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, PKK, Muslimat, Fatayat, Aisyah, PR NU, PR Muhammadiyah, dan umat minoritas yang beragama Kristen dan Budha. Dalam kegiatan Ngaji Multikulturalisme dan Kebhinekaan tersebut yang menjadi penceramah adalah Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I. yang memberikan pemahaman terhadap warga tentang realitas multikultural dan kemajemukan masyarakat, pentingnya sikap toleransi, saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas dan persaudaraan.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Diambil dari Laporan Triwulan Lakpesdam NU Jepara periode 2010-2015 selama bulan Juli-september 2015.

Kegiatan yang kelima adalah Jalan Sehat dan malam tirakatan kemedekaan RI. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indoneis yang Ke 70 dan sekaligus sebagai upaya untuk membaurkan warga dalam pesta kemerdekaan. Dalam kegiatan tersebut, Lakpesdam NU Jepara bekerja sama dengan ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Cahaya Mandiri, Karang Tarunan Desa dermolo dan mahasiswa KKN dari UNDIP Semarang. Setelah acara Jalan sehat, malam harinya dilanjutkan prosesi tirakatan renungan mengenang perjuangan para pejuang dan pahlawan Indonesia yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan oleh paduan suara ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Cahaya Mandiri yang terdiri dari warga yang beragama Islam, Budha, Hindu dan Kristen. Kegiatan tersebut di tutup dengan do'a bersama dan potong tumpeng inklusi yang di buat oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Cahaya Mandiri.⁴³

Kegiatan yang keenam adalah *Training of Trainer* (ToT) Kader Peduli Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mensinergikan antara program inklusi sosial dengan Program Pengawal UU Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari minggu, 30 Agustus 2015 di Rumah Makan Maribu Jepara yang diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari perwakilan Karang Taruna di 8 kecamatan⁴⁴ yang ada di Jepara.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Adapun Karang Taruna Desa yang mengikuti acara tersebut adalah Karang Taruna Desa Dermolo, Tubanan (Kecamatan Kembang), Karang Taruna Desa Ragu Lampitan, Sumosari (Kecamatan Batealit), Karang Taruna Desa Sri kandang, Bondo (Kecamatan Bangsri), Karang

Dalam kegiatan pelaksanaan TOT tersebut menghadirkan beberapa narasumber. Narasumber yang pertama adalah Bapak Arwin Noor Isdiyanto, Kabag Pemerintahan Kabupaten Jepara yang membicarakan topik tata kelola Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa, dan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Narasumber yang kedua adalah Bapak Djami Rosjadi dan Purjanto (Bappeda Jepara) yang membahas tentang pelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Narasumber yang ketiga adalah Bapak Danang Kristiawan (Pendeta GITJ Jepara) yang menyampaikan materi tentang pengelolaan keberagaman dan membangun perdamaian. Sedangkan narasumber yang terakhir adalah Ibu Mayadina Rohma Musfiroh (Lakpesdam NU Jepara/Fitra Jawa Tengah) yang membicarakan teknik dan strategi mengawal kebijakan desa.

Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan Workshop Peduli Desa di Hall Rumah Makan Maribu Jepara.⁴⁵ Kegiatan tersebut dibuka oleh KH. Asyhari Syamsuri dari Ketua PC.NU Kabupaten Jepara dan menghadirkan empat nara sumber yaitu Tri Antoro⁴⁶

Taruna Desa Pancur (Kecamatan Mayong), Karang Taruna Desa Plajan (Kecamatan Pakis Aji), Karang Taruna Desa Tahunan (Kecamatan Tahunan), Karang Taruna Desa Karanggondang (Kecamatan Mlonggo), dan Karang Taruna Desa Panggang, Jepara (Kecamatan Jepara). Selain itu, juga dihadiri Pemuda Gereja Injili Kristen Jawa (GITJ) Jepara dan Pemuda Hindhu (Prada) Desa Karanggondang. Lihat *Ibid.*,

⁴⁵ Kegiatan tersebut mengundang 100 orang yang terdiri dari Perwakilan Pemuda Karang Taruna 8 Kecamatan, Perwakilan Petinggi/Kepala Desa Se-Kab. Jepara, DPRD Jepara, SKPD (Bapermardes, BP2KB, Bappeda, Tapem), UNISNU Jepara, PCNU Jepara, Muhammadiyah Jepara, MUI, Kejari Jepara, Polres Jepara, GP Ansor, PMII, dan IPNU-IPPNU. *Ibid.*

⁴⁶ Inti dari pemaparan yang disampaikan adalah pentingnya mengelola Pemerintahan dengan pendekatan inklusif dengan syarat yang mencakup transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, serta adanya kesetaraan tanpa tebang pilih dengan merangkul semua masyarakat. Lihat *Ibid.*

dari Kabag Pemerintahan yang mewakili Bupati Wonosobo, Dr. H. Subroto⁴⁷ sebagai wakil Bupati Jepara, Aris Isnandar⁴⁸ sebagai wakil Ketua Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, dan Mayadina Rohma Musfiroh⁴⁹ sebagai wakil dari Lakpesdam NU Jepara dan Fitra Jawa Tengah.

Kegiatan yang ketujuh adalah mengadakan kegiatan “Pagelaran Budaya dan Lomba Nilai-Nilai Toleransi Kewargaan” sekaligus sedekah hasil bumi. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menumbuhkan semangat pluralisme dan kemajemukan di tengah masyarakat Dermolo yang multiagama. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 18 September 2015 yang diikuti oleh seluruh elemen warga masyarakat Desa Dermolo yang berjumlah sekitar 1000 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi pelajar dan pemuda, kelompok perempuan cahaya mandiri, dan warga masyarakat dermolo baik mayoritas islam NU dan Muhammadiyah maupun minoritas Kristen dan Hindu.⁵⁰

Bentuk acara tersebut adalah karnaval seni dan budaya dengan membawa arak-arakan hasil bumi. Semua warga masyarakat Desa Dermolo dari berbagai latar belakang, petani, buruh, guru, pegawai, pelajar, dan warga yang berbeda keyakinan agama menyatu dan guyub rukun berjalan serta bergandengan tangan dengan menampilkan kesenian sambil mengarak hasil

⁴⁷ Materi yang disampaikan adalah tentang pentingnya implementasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Jepara. *Ibid.*

⁴⁸ Inti dari materi yang disampaikan adalah pentingnya menjunjung tinggi musyawarah desa dan kemandirian desa. *Ibid.*

⁴⁹ Inti dari materi yang disampaikan adalah tentang Jender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa, dimana perempuan harus terlibat dalam pembangunan Desa. Harapan dari pemateri adalah agar dalam mengelola Desa melibatkan kaum marjinal dan lemah. *Ibid.*, hlm. 2.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

bumi (*Jembul*) menuju punden. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Petinggi beserta perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan polisi dan TNI, serta wakil bupati Jepara, DR. H. Subroto, MM. Setelah karnaval, kegiatan dilanjutkan dengan Panggung Inklusi dengan Pementasan-pementasan kesenian dari warga dan Pementasan Wayang orang dengan judul Pentingnya Hidup Inklusif. Acara Sedekah Hasil Bumi dan Pagelaran Budaya di tutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh para tokoh lintas agama.⁵¹

Kegiatan yang kedelapan adalah mengadakan acara *Talkshow* dengan menghadirkan berbagai narasumber dari unsur Pemerintahan Jepara seperti Bupati Jepara KH. Ahmad Marzuqi, Wakil Bupati Jepara DR. H. Subroto, SE. MM, Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti BAPERMARDES dan BAPPEDA, DRPD Jepara, Pegiat Anggaran seperti FITRA, Lakpesdam NU Jepara, dan Perwakilan Petinggi/Kepala Desa. Dalam kegiatan tersebut, narasumber menyampaikan berbagai gagasan dan pemikirannya terkait persoalan-persoalan yang di hadapi masyarakat baik terkait dengan persoalan mewujudkan tata kelola masyarakat yang inklusif maupun tata kelola pelaksanaan UU Desa yang di dalam di atur terkait Dana Desa. Tujuan dari talkshow ini agar dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada warga terkait mekanisme pengelolaan dana desa dari proses perencanaan dan penganggarannya dan warga masyarakat juga ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pelaksanaan dana desa.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 4.

Kegiatan yang kesembilan mengadakan program *Capacity Building* (Penguatan Kapasitas) terhadap Kader Peduli Desa sebagai tindak lanjut dari agenda *Training of Trainer* (ToT) Kader Peduli Desa. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari perwakilan Karang Taruna di 8 kecamatan yang ada di Jepara, dan menghasilkan rumusan kerja Kader Peduli Desa di antaranya: 1) Ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran desa; 2) Ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan desa; 3) Ikut mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa; dan 4) Mengawal pencairan dan penggunaan dana desa.

Kegiatan yang kesepuluh adalah *Inclusive competition*, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 september 2015 di pendopo balai desa Dermolo. *Inclusive competition* merupakan lomba mewarnai gambar yang mendeskripsikan kerukunan masyarakat yang pesertanya dari siswa-siswi kelas 1 dan 2 tingkat SD (sekolah dasar) se-Dermolo. Selain itu, lomba yang lain adalah membuat logo untuk desa Dermolo yang diikuti oleh pemuda-pemudi dari lintas agama yang ada di desa Dermolo. Sedangkan lomba yang terakhir adalah lomba memasak yang pesertanya adalah ibu-ibu perwakilan dari masing-masing RW dan melibatkan masing-masing perwakilan agama yang ada di desa Dermolo.⁵²

Kegiatan yang terakhir adalah advokasi kebijakan. Lakpesdam NU Jepara melakukan kegiatan tersebut bersama Bupati dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah sebagai bentuk intervensi agar pemerintah daerah dapat

⁵² *Ibid.*

memberikan solusi terbaik terkait pendirian gereja yang selama ini tidak ada kejelasan tentang status keberadaannya.

Sebagai salah satu bentuk dampak dari adanya beberapa program yang dilaksanakan oleh Lakpesdam NU Jepara terkait toleransi beragama di Desa Dermolo adalah adanya perayaan Natal yang dilaksanakan secara terbuka pada hari ahad, 27 Desember 2015 di lapangan Desa Dermolo yang tidak hanya diikuti oleh umat Kristiani saja, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat.